



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG

ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi Gorontalo perlu adanya dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang sanitasi di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ, tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, Bagian V Kegiatan SKPD Provinsi b.1) menyusun roadmap sanitasi provinsi dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PFZT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut RSP, adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik dan drainase lingkungan.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

RSP disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan bagi provinsi dalam menentukan: Arah kebijakan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi, Strategi Kebijakan Sanitasi ini untuk dijadikan salah satu program prioritas yang dimasukkan ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD di provinsi maupun di Kabupaten/kota.

BAB III
SISTIMATIKA, ISI DAN URAIAN RSP

Pasal 3

- (1) Sistimatika RSP Gorontalo disusun sebagai berikut :
- | | | |
|---------|---|---|
| Bab I | : | Pendahuluan; |
| Bab II | : | Kondisi Sanitasi Saat Ini dan Target Capaiannya; |
| Bab III | : | Visi, Misi, Strategi Sanitasi Provinsi Gorontalo; |
| Bab IV | : | Arah Kebijakan dan Program Prioritas Sanitasi Provinsi; |
| Bab V | : | Penutup. |
- (2) Isi dan Uraian RSP Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan arah kebijakan pembangunan sanitasi di daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi :
- a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga;
 - b. penanganan air limbah domestik;
 - c. pengelolaan drainase lingkungan;
 - d. pelaksanaan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - e. pelaksanaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan;
 - f. pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil program dan kegiatan;
 - g. peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi daerah;
 - h. evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efesiensi dan perubahan yang dihasilkan dari program dan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sanitasi di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Gorontalo sesuai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh SKPD terkait, maka pelaksanaannya didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Koordinasi perencanaan Roadmap Sanitasi dengan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka tahunan.

- (2) Dalam pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi telah dibentuk Tim Pokja Sanitasi Provinsi yang mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi tahunan.
- (3) Ketua Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil capaian kegiatan setiap tahun kepada Gubernur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



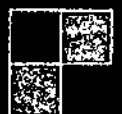
Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2019

Pokja Sanitasi
Provinsi Gorontalo



Kata Pengantar

Pembangunan sector sanitasi di Indonesia dapat dikatakan relative masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan lainnya. Berbagai program pembangunan sanitasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat, namun demikian hasilnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dinamis dan terus meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya percepatan pembangunan sanitasi.

Percepatan pembangunan di bidang sanitasi harus diseriusi, mengingat sanitasi yang buruk akan berdampak luas, sehingga pemerintahan harus memperhatikan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sanitasi. Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo merupakan hasil kinerja Pokja Sanitasi yang berkoordinasi dengan SKPD terkait Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam merencanakan pembangunan sanitasi kedepan hingga tahun 2019 di Provinsi Gorontalo. Kondisi sanitasi yang buruk di Provinsi Gorontalo menginisiasi penyusunan Roadmap Sanitasi yang isinya memaparkan tentang kondisi sanitasi di Provinsi Gorontalo serta langkah-langkah komprehensif yang akan diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo guna mewujudkan pengelolaan sanitasi yang baik dan terintegrasi.

Program kegiatan yang di usulkan dan yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran di setiap SKPD terkait dan dokumen-dokumen perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo, semoga dokumen ini dapat di manfaatkan dalam perencanaan dan pencapaian target sanitasi di Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tujuan	I - 3
1.3 Sasaran	I - 3
1.4 Landasan Hukum	I - 4
1.5 Ruang Lingkup Roadmap Sanitasi	I - 4
1.6 Metodologi Penyusunan Roadmap	I - 5
BAB 2 PROFIL SANITASI PROVINSI GORONTALO.....	II - 6
2.1 Profil Teknis.....	II - 6
2.1.1 Kondisi Umum	II - 6
2.1.2 Kondisi Pengelolaan persampahan	II - 7
2.1.3 Kondisi pengelolaan Air Limbah	II -13
2.1.3 Kondisi pengelolaan Drainase	II -21
2.1.3 Area Beresiko Sanitasi	II -26
BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO.....	III -27
3.1 Visi Pembangunan Sanitasi	III -27
3.2 Misi Pembangunan Sanitasi	III -27
3.2.1 Misi Persampahan	III -27
3.2.2 Misi Air Limbah	III -27
3.2.3 Misi Drainase	III -28
BAB 4 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO.....	IV -29
4.1 Isu Strategis	IV -29
4.2 Penetapan Strategi Pembangunan Sanitasi dengan metode SWOT	IV -32
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI	V -40
BAB 6 PENUTUP	VI -45

LAMPIRAN1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Dasar.....	II - 6
Tabel 2.2	Perhitungan Produksi Sampah, Air Limbah, dan Panjang.....	II - 7
Tabel 2.3	Keberadaan Peraturan Persampahan.....	II - 7
Tabel 2.4	Profil Infrastruktur TPA	II - 8
Tabel 2.5	Profil Infrastruktur TPS/TPST	II - 9
Tabel 2.6	Profil Infrastruktur Pengangkutan Sampah ke TPA	II - 9
Tabel 2.7	Profil Reduksi Sampah melalui 3R	II -10
Tabel 2.8	Profil Perencanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah ..	II -10
Tabel 2.9	Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah	I -11
Tabel 2.10	Keberadaan Peraturan Air Limbah	I -13
Tabel 2.11	Profil Infrastruktur Air Limbah Terbangun System Off-Site	I -14
Tabel 2.12	Profil Infrastruktur Penampungan Awal Air Limbah Terbangun System On-Site	I -15
Tabel 2.13	Profil Infrastruktur Pengelolaan Akhir Air Limbah dan Pengangkutannya	I -16
Tabel 2.14	Profil BABS	I -17
Tabel 2.15	Profil BABS Hasil EHRA	I -17
Tabel 2.16	Profil Perencanaan Air Limbah	I -18
Tabel 2.17	Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Air Limbah	I -18
Tabel 2.18	Profil Infrastruktur Drainase Terbangun	I -22
Tabel 2.19	Profil Perencanaan Drainase	I -23
Tabel 2.20	Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Drainase	I -23
Tabel 2.21	Area Beresiko Rawan Sanitasi	I -26
Tabel 4.1	Identifikasi SWOT Komponen Persampahan	I -33
Tabel 4.2	Identifikasi SWOT Komponen Air Limbah	I -33
Tabel 4.3	Identifikasi SWOT Komponen Drainase	I -35
Tabel 4.4	Matriks SWOT Komponen Persampahan	I -36
Tabel 4.5	Matriks SWOT Komponen Air Limbah.....	I -37
Tabel 4.6	Matriks SWOT Komponen Drainase	I -38
Tabel 5.1	Perumusan Kebijakan Pembangunan Persampahan.....	I -41
Tabel 5.2	Perumusan Kebijakan Pembangunan Air Limbah	I -42
Tabel 5.3	Perumusan Kebijakan Pembangunan Drainase	I -43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kondisi pengelolaan sampah | -12

Gambar 2.1 Kondisi pengelolaan Air Limbah | -20

Gambar 2.1 Kondisi drainase | -25

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang dikeluarkan PBB memperlihatkan bahwa Indonesia menduduki urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi buruk. Diperkirakan 100 juta dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang baik. Data global pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan masih buang air besar sembarangan di sungai, danau, laut, atau di daratan. Data Badan Pusat Statistik pada 2006 menyebutkan, hanya 55% masyarakat Indonesia yang dapat menikmati akses sanitasi sehat dan toilet higienis. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi sehat dan toilet higienis.

Hal tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi sanitasi di Provinsi Gorontalo, dari fakta yang ada tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berbenah terkait dengan sanitasinya. Misi pertama pembangunan Provinsi Gorontalo yang diusung secara jelas dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 adalah **"Memfokuskan Peningkatan Ekonomi, atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat"** Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Adapun tujuan dari misi tersebut diatas yakni Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah, dengan sasaran yakni meningkatnya infrastruktur daerah, membangun kemandirian desa dan meningkat dan berkembangnya infrastruktur desa.

Dari misi tersebut dijabarkan lagi melalui arah kebijakan yang mendorong ketersediaan air bersih dan sanitasi di Provinsi Gorontalo menuju *Universal Sanitation Access* bagi Indonesia di Tahun 2020.

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih mengintensifkan pembangunan sanitasi Gorontalo yakni dengan masuk sebagai peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan 4 Kabupaten/Kota di tahun 2013 yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan 2 kabupaten sisanya yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato mengikuti program PPSP pada tahun 2014.

Seiring dengan keikutsertaan dalam program PPSP, Provinsi Gorontalo mengutamakan pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pembangunan sanitasi akan dimuat tersendiri di dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo. Roadmap sanitasi diharapkan akan mengupayakan pembangunan sanitasi sesuai dengan kebutuhan dengan mengerahkan potensi yang ada. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat dampak sanitasi yang sangat luas, termasuk untuk mendukung misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara lainnya, khususnya terkait dengan peningkatan kesehatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Secara umum kondisi sanitasi di Provinsi Gorontalo telah dijelaskan di dalam dokumen Perencanaan RPJMD 2012-2017 yakni akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 49 % di tahun 2008 menjadi 60 % di tahun 2011 belum mencapai target sebesar 65 %, persentase keluarga menggunakan air bersih menurun dari 58 % tahun 2008 menjadi 56 % dari target 70 % pada tahun 2010, dan penurunan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 65 % tahun 2008 menjadi 59 % dan belum mencapai target 75 % pada tahun 2010; selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah

Target pencapaian pelayanan air minum dan sanitasi sesuai dengan target *Universal Sanitation Access* sampai tahun 2020 yaitu 100% dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011, pencapaian target air minum baru mencapai 40,60% atau 478.476 jiwa dan sanitasi mencapai 51 % atau 530.484 jiwa, sehingga untuk mencapai target tersebut diperlukan suatu peta jalan sanitasi yang menjamin program sanitasi dijalankan terukur dan sesuai target.

1.2 Tujuan

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, di Provinsi Gorontalo beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu merupakan keterkaitan dengan komitmen global dalam MDGs. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu.

Salah satu program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yakni perbaikan sanitasi dasar, sehingga harapannya dengan tersusunnya Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo dapat memberikan solusi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo;
- b) Mewujudkan visi yang sama di antara para stakeholder di Provinsi Gorontalo tentang kondisi sanitasi yang akan dicapai sampai dengan tahun terakhir perencanaan roadmap;
- c) Mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo;
- d) Menyusun database sanitasi sebagai alat monitoring dan evaluasi dan Pelaporan status sanitasi Provinsi.

1.3 Sasaran

Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo dimaksudkan sebagai pedoman bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengarusutamakan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo. Selain itu pula Roadmap Sanitasi juga dimaksudkan sebagai :

- a) Bahan advokasi pembangunan sanitasi, baik di internal provinsi maupun advokasi ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- b) Menjadi dasar perencanaan pembangunan formal di provinsi (RPJMD, Renstra SKPD, maupun RKPD Provinsi).

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah :

- a) Undang-Undang RI no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- b) Undang-Undang RI no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
- d) Permendagri no 32 tahun 2012 tentang penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
- e) Surat Edaran (SE) Mendagri no 660/4919/SJ tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah
- f) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo No 112/09/II tahun 2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

1.5 Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo

Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo membahas tentang seluruh komponen sanitasi permukiman yang meliputi : air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan. Seluruh komponen tersebut akan

digambarkan kondisi eksistingnya guna menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan sanitasi.

Roadmap juga akan menggambarkan intervensi program maupun anggaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo guna mencapai kondisi sanitasi yang diinginkan di tahun terakhir perencanaan roadmap. Dalam hal ini, Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menjadi pedoman menuju pencapaian target sanitasi Provinsi Gorontalo.

1.6 Metodologi Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi

Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo disusun melalui serangkaian pertemuan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo dengan melibatkan berbagai unsur Pokja Sanitasi lainnya yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas keuangan, dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo. Secara umum metode yang digunakan dalam penyusunan roadmap adalah sebagai berikut :

a) Diskusi dan wawancara

Metode ini umum digunakan dalam hal mengumpulkan data sanitasi di berbagai sumber yang ada di provinsi. Diskusi dan wawancara juga digunakan untuk mendapatkan input mengenai kondisi sanitasi eksisting.

b) Desk Study

Metode on-desk terutama digunakan ketika menyusun dokumen roadmap setelah mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder terkait. Metode ini juga sering digunakan ketika melakukan analisis ataupun mencari masukan dari literatur yang dibutuhkan.

c) Presentasi

Presentasi umumnya digunakan untuk menginterpretasikan hasil temuan ataupun analisis ataupun untuk mendeskripsikan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya metode ini diikuti dengan metode Tanya jawab ataupun diskusi.

d) Focus Group Discussion (FGD)

Metode ini digunakan dalam hal mendiskusikan temuan setelah melakukan analisis terhadap kondisi sanitasi di wilayah provinsi berdasarkan data yang di

dapat. Metode ini juga digunakan untuk membentuk komitmen dan consensus yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari analisis yang telah dilakukan. FGD dilakukan terutama di antara para anggota Pokja Sanitasi Provinsi, sebagai wakil dari SKPD masing-masing anggota.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

BAB II

PROFIL SANITASI PROVINSI GORONTALO

2.1 Profil Teknis

Kondisi infrastruktur eksisting sanitasi akan menjelaskan tentang data-data dan informasi, tentang kondisi real sanitasi di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2013. Selengkapnya kondisi eksisting dijelaskan di bawah ini.

2.1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum yang dimaksudkan adalah data-data riil Provinsi Gorontalo yang akan dijadikan dasar perhitungan ke depan. Termasuk ke dalamnya adalah jumlah desa, kecamatan, penduduk, dan jumlah keluarga (lihat Tabel 2.1 di bawah).

Tabel 2.1
Data Dasar Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kab.Kota	Desa	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2012 (jiwa)	Luas lahan terbangun (ha)
1	Kota Gorontalo	50	9	193,692	1,420
2	Kabupaten Gorontalo	205	19	365,781	13,293
3	Kabupaten Bone Bolango	166	18	148,971	7,333
4	Kabupaten Gorontalo Utara	123	11	108,324	1,782
5	Kabupaten Pohuwato	104	13	139,675	5,000
6	Kabupaten Boalemo	84	7	141,547	4,750

Sumber : Gorontalo Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa umumnya wilayah Provinsi Gorontalo didominasi oleh kabupaten/kota kecil. Hal ini dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Provinsi Gorontalo mengingat pendekatan pembangunan sanitasi ideal yang terintegrasi dapat dilaksanakan dalam kondisi yang tidak sekompleks di kota besar ataupun metropolitan.

Data di atas selanjutnya menjadi dasar dalam menghitung timbulan sampah, air limbah, dan panjang drainase lingkungan yang ideal di masing-masing kabupaten/kota ataupun secara agregasi di Provinsi Sulawesi Utara. Perhitungan besar produksi sampah, air limbah, dan panjang drainase sebagai benchmark pembangunan ke depan diperlihatkan pada Tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2.2
Perhitungan Produksi Sampah, Air Limbah, dan Panjang Drainase
Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Timbulan sampah (m3/hari)	Produksi air limbah (m3/hari)	Produksi tinja (m3/hari)	Produksi grey water (m3/hari)	Panjang drainase terbangun	total panjang saluran ideal
1	Kota Gorontalo	125.00	22,712.30	-	-	149,727.0	149,727
2	Kabupaten Gorontalo	125.00	33,027.40	-	-	20,370,000.0	20,370,000
3	Kabupaten Bone Bolango	125.00	12,874.20	-	-	6,543,200.0	4,000
4	Kabupaten Gorontalo Utara	120.00	9,157.80	-	-	5,000.0	5,000
5	Kabupaten Pohuwato	150.00	20,533.10	-	-	6,500.0	6,500
6	Kabupaten Boalemo	268.00	19,790.10	-	-	1,500.0	1,500

Sumber : Hasil Perhitungan

2.1.2 Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Peraturan tentang pengelolaan persampahan

Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat 4 kabupaten/kota (80% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan 2 kabupaten yang sama sekali belum membuat peraturan tentang persampahan di daerahnya. Selengkapnnya keberadaan peraturan mengenai persampahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Keberadaan Peraturan Persampahan di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Peraturan terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati / Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1	Kota Gorontalo	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kabupaten Pohuwato	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Kabupaten Boalemo	Ada	Ada	Tidak ada	Ada

Sumber : Hasil Penelusuran

b. Infrastruktur pengelolaan sampah terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastruktur pengelolaan sampah terbangun di Provinsi Gorontalo, maka gambaran infrastruktur ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti Tabel 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7 di bawah.

Tabel 2.4
Profil Infrastruktur TPA di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPA	Luas TPA (ha)	Kapasitas TPA perhari (m3/hari)	Sisa lahan TPA (ha)	% sampah tertangani TPA**	Volume sampah yg masuk ke TPA (m3/hari)	Sisa umur TPA* (tahun)	Design infrastruktur terbangun	Pengelolaan eksisting	Pengelola
1	Kota Gorontalo	1	15.00	125.00	0.0	12.54%	60.00	-	Sanitary landfill		BLH
2	Kabupaten Gorontalo	1	15.00	125.00	0.0	14.43%	41.01	-	Sanitary landfill		UPTD
3	Kabupaten Bone Bolango	1	15.00	125.00	0.0	13.74%	15.00	-	Sanitary landfill		BLH
4	Kabupaten Gorontalo Utara	1	5.20	120.00	0.0	151.09%	21.09	0.04	Sanitary landfill		BLH
5	Kabupaten Pohuwato	1	5.20	150.00	0.0	27.83%	15.00	-	Sanitary landfill		BLH
6	Kabupaten Boalemo	1	8.00	268.00	6.0	45.42%	15.00	-	Sanitary landfill		KLH

Sumber : Hasil Perhitungan

Keterangan :

Tabel 2.4 di atas memperlihatkan bahwa profil infrastruktur TPA di wilayah Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat 3 (tiga) kabupaten yang belum memiliki TPA. Perlu diperhatikan pertimbangan pembangunan TPA atau regionalisasi TPA di ketiga kabupaten tersebut;
2. Hingga tahun 2012, pengelolaan sampah di TPA yang ada masih di bawah kapasitas TPA terbangun, dimana volume terkelola di TPA bervariasi antara 5% hingga 15% dari timbulan sampah di masing-masing kabupaten/kota;
3. Dari 3 (tiga) TPA terbangun, terdapat 2 (tiga) TPA yang umurnya kurang dari 5 tahun, bahkan sudah ada TPA yang sudah habis umur pakainya;
4. Dari 3 (tiga) TPA terbangun, belum ada TPA yang sudah dibangun dengan fasilitas *sanitary landfill*, umumnya operasional masih secara *open dumping*.
5. Adapun TPA yang dibangun dengan fasilitas *sanitary landfill* dan beroperasi dengan sistem *control landfill* hanya TPA regional provinsi yang melayani 3 kabupaten/kota
6. Seluruh TPA terbangun dikelola oleh SKPD terkait.

Tabel 2.5
Profil Infrastruktur TPS/TPST di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kab.Kota	Jumlah TPS/TPST	Kapasitas TPS/TPST (m3/hari)	% layanan TPS/TPST
1	Kota Gorontalo	11	28.0	5.39%
2	Kabupaten Gorontalo	9	24.0	2.37%
3	Kabupaten Bone Bolango	5	16.0	3.94%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	6	18.0	6.06%
5	Kabupaten Pohuwato	7	20.0	5.37%
6	Kabupaten Boalemo	5	16.0	4.27%

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari Tabel 2.5, terlihat bahwa TPS/TPST di wilayah Provinsi Gorontalo masih sangat minim sehingga perlu perhatian agar pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPA dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Tabel 2.6
**Profil Infrastruktur Pengangkutan Sampah ke TPA
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	Truk biasa	Dump truck	Armroll truck	Compactor	Perkiraan kebutuhan armada
1	Kota Gorontalo	3.0	4.0	5.0	0.0	-
2	Kabupaten Gorontalo	1.0	1.0	1.0	1.0	-
3	Kabupaten Bone Bolango	0.0	2.0	0.0	0.0	-
4	Kabupaten Gorontalo Utara	0.0	1.0	0.0	0.0	-
5	Kabupaten Pohuwato	1.0	2.0	0.0	0.0	-
6	Kabupaten Boalemo	0.0	4.0	0.0	0.0	-

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari sisi pengangkutan sampah menuju TPA juga masih terlihat belum memenuhi kebutuhan. Masih diperlukan penambahan unit pengangkut sampah yang sesuai dengan kriteria teknis yang memadai guna semakin meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.7
Profil Reduksi Sampah melalui 3R
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	volume sampah terolah 3R (m3/hari)	% reduksi sampah melalui 3R
1	Kota Gorontalo	3.0	0.58%
2	Kabupaten Gorontalo	0.0	0.00%
3	Kabupaten Bone Bolango	40.0	9.52%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	2.4	0.81%
5	Kabupaten Pohuwato	0.0	0.00%

Sumber : Hasil Perhitungan

Pelaksanaan 3R di wilayah Provinsi Gorontalo masih belum maksimal, dimana berdasarkan Tabel 2.7 di atas memperlihatkan secara keseluruhan baru mampu mereduksi total timbulan sampah sebesar 9.52% (dari perkiraan 20% ideal pengurangan sampah melalui 3R).

c. Perencanaan tentang pengelolaan persampahan

Aspek perencanaan memegang peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dan pembangunan persampahan, mengingat perencanaan kegiatan awal dari pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan persampahan. Dalam hal ini semua kabupaten/kota yang telah mencantumkan pengelolaan dan pembangunan persampahan di dalam perencanaan formalnya (RPJMD, Renstra SKPD dan masterplan), untuk jelasnya lihat Tabel 2.8 di bawah.

Tabel 2.8
Profil Perencanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Masterplan Sampah
1	Kota Gorontalo	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	Ada	Ada	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	Ada	Ada	Ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Ada	Ada	Ada
5	Kabupaten Boalemo	Ada	Ada	Ada
6	Kabupaten Pohuwato	Ada	Ada	Ada

Sumber : Hasil Penelusuran

d. Pendanaan pembangunan persampahan

Pendanaan pengelolaan dan pembangunan persampahan secara tidak langsung memperlihatkan kepedulian kabupaten/kota terhadap kebersihan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Tabel 2.9 memperlihatkan bahwa 2 kabupaten/kota memiliki pendanaan investasi persampahan dan biaya OM-nya. Sedangkan 4 kabupaten lainnya belum memasukkan data terkait pendanaan sanitasi daerahnya.

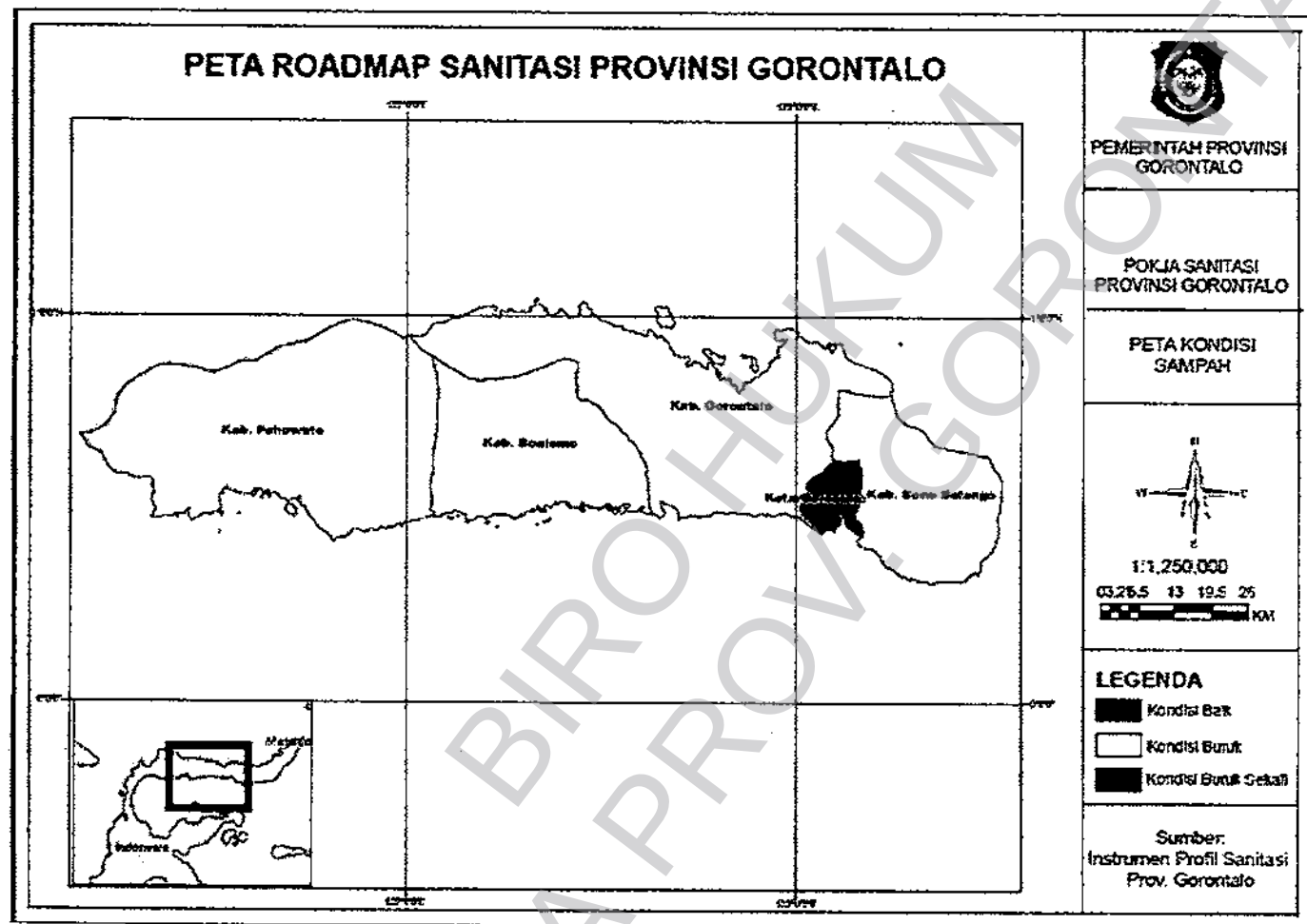
Tabel 2.9
Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Sampah
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	Pendanaan investasi persampahan baru	Besar pendanaan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) persampahan	Total investasi dan O&M persampahan	Total APBD	% total O&M & investasi baru persampahan terhadap APBD
1	Kota Gorontalo	10,280,724,578.0	4,597,425,500.0	14,878,150,078.0	825,000,000,000	1.80%
2	Kabupaten Gorontalo	10,280,724,578.0	1,713,454,096.3	11,994,178,674.3	850,646,801,914	1.41%
3	Kabupaten Bone Bolango	1,172,000,000.0	4,110,000,000.0	5,282,000,000.0	596,642,827,112	0.89%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	335,800,000.0	928,450,000.0	1,264,250,000.0	415,000,000,000	0.30%
5	Kabupaten Pohuwato	-	-	-	592,682,964,063	0.00%
6	Kabupaten Boalemo	459,742,500.0	-	459,742,500.0	487,378,818,979	0.09%

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap profil sampah di atas (lihat Lampiran) maka peta profil persampahan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan persampahan di hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo masih dikategorikan dalam kondisi yang kurang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya terukur dan konprehensif agar kondisi pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Gorontalo ke depan dapat lebih baik lagi.



Gambar 2.1 kondisi pengelolaan sampah Provinsi Gorontalo

2.1.3 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Peraturan tentang pengelolaan air limbah

Berdasarkan Tabel 2.10 di bawah terlihat bahwa peraturan tentang air limbah masih sangat minim, hanya terdapat 1 (satu) daerah yang belum menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Penyusunan dan penetapan peraturan tentang air limbah di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo ke depan penting untuk mendorong agar pengelolaan dan pembangunan air limbah dapat dilakukan dengan lebih baik.

Tabel 2.10
Keberadaan Peraturan Air Limbah di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Perda		PerBup/Perwal	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1	Kota Gorontalo	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kabupaten Pohuwato	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Kabupaten Boalemo	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

b. Infrastruktur pengelolaan air limbah terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastruktur pengelolaan air limbah terbangun di Provinsi Gorontalo, Tabel 2.11, 2.12, 2.13, dan 2.14 di bawah menyajikan masing-masing profil secara jelas.

Tabel 2.11
Profil Infrastruktur Air Limbah Terbangun System Off-Site di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	Off Site System						
		Sewerage dan IPAL Terpusat/Kawasan						
		Keberadaan sistem offsite	Kapasitas terpasang (m3/hari)	jumlah sambungan rumah (SR)	jumlah jiwa terlayani (jiwa)	Prosentase utilisasi sistem (%)	Pengelola	Prosentase cakupan layanan sistem Offsite
1	Kota Gorontalo	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%
2	Kabupaten Gorontalo	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%
3	Kabupaten Bone Bolango	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%
5	Kabupaten Pohuwato	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%
6	Kabupaten Boalemo	Tidak ada	0.0	0.0	-	0.0%	-	0.0%

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

Sistem sewerage belum ada di seluruh kabupaten maupun kota, sehingga diharapkan dapat di dorong untuk melaksanakan sistem tersebut.

Tabel 2.12
Profil Infrastruktur Penampungan Awal Air Limbah Terbangun System On-Site di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/ Kota	on-site penampungan awal														
		Sistem individual			Sistem komunal											
		Jumlah KK dengan jamban sehat dan tangki septik	Jumlah penduduk yang terlayani (jiwa)	Presentase cakupan layanan sistem individual	Tangki septik komunal				MCK/MCK++				IPAL komunal			
					Jumlah tangki septik komunal	Jumlah KK pengguna septic tank komunal	Jumlah penduduk terlayani septic tank komunal (jiwa)	Presentase cakupan layanan tangki septik komunal	Jumlah sarana MCK/MCK++	Jumlah KK pengguna MCK / MCK++	Jumlah penduduk terlayani MCK / MCK++ (jiwa)	Presentase cakupan layanan MCK/MCK++	Jumlah IPAL komunal	Jumlah KK yang dilayani IPAL komunal	Jumlah jiwa terlayani IPAL komunal (jiwa)	Presentase cakupan layanan IPAL Komunal
1	Kota Gorontalo	30.985	124,957	66.2%	2	2	8.1	0.004%	1	47	190	0.1%	2	58	233.90	0.1%
2	Kabupaten Gorontalo	32.694	151,961	39.1%	1	1	5	0.001%	1	63	293	0.1%	1	35	163	0.0%
3	Kabupaten Bone Bolango	15.845	60,569	39.6%	0	0	-	0.000%	3	70	270	0.2%	0	0	-	0.0%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	5.641	22,632	20.9%	2	2	8	0.007%	2	30	120	0.1%	2	48	193	0.2%
5	Kabupaten Pohuwato	13.104	55,024	40.7%	1	1	4	0.003%	1	15	63	0.0%	0	0	-	0.0%
6	Kabupaten Boalemo	16.290	64,109	47.0%	1	1	4	0.003%	1	20	79	0.1%	1	37	146	0.1%

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

Sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.12 di atas, terlihat bahwa penampungan awal air limbah (tinja) di wilayah Provinsi Gorontalo masih didominasi dengan system on-site berupa jamban individu. Sistem komunal relatif belum dimulai hingga saat ini.

Tabel 2.13
Profil Infrastruktur Pengelolaan Akhir Air Limbah dan Pengangkutannya
di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				Pengangkutan/Pengaliran				NILAI PENGANGKUTAN
		jumlah (unit)	Kapasitas terpasang (m3/hari)	% kapasitas terhadap jumlah produksi black water total	Pengelola	Jumlah armada truk tinja (unit)	Volume lumpur tinja terangkut oleh armada dalam satu kali ritase (m3)	Prosentase lumpur tinja yang terangkut dari total potensi	Pembuangan lumpur tinja	
1	Kota Gorontalo	1	2.000,0	38.81%	SKPD	2	8	0%	IPLT	2
2	Kabupaten Gorontalo	0	0,0	0.00%	-	0	0	0%	-	0
3	Kabupaten Bone Bolango	0	0,0	0.00%	-	0	0	0%	-	0
4	Kabupaten Gorontalo Utara	0	0,0	0.00%	-	0	0	0%	-	0
5	Kabupaten Pohuwato	0	0,0	0.00%	-	0	0	0%	-	0
6	Kabupaten Boalemo	0	0,0	0.00%	-	0	0	0%	-	0

Sumber : Data dari kabupaten/kota tahun 2013

Tabel 2.13 di atas memperlihatkan bahwa IPLT di Provinsi Gorontalo hanya berada di Kota Gorontalo, hanya ada kolam pembuangan lumpur tinja yang dikelola oleh koperasi, sehingga umumnya lumpur tinja dibuang langsung ke lingkungan. Kelengkapan dan prosedur di kolam pembuangan yang ada belum mengikuti aturan standar pengelolaan lumpur tinja sehingga dikhawatirkan hasil pengelolaan masih mencemari lingkungan. Hal ini juga dilengkapi dengan minimnya armada truk pengangkut tinja yang hanya ada di Kota Gorontalo. Ke depan perlu pembenahan besar-besaran untuk penanganan lumpur tinja agar lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat lebih aman dari pencemaran lumpur tinja ini.

Tabel 2.14
Profil BABS di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	jumlah KK yang BABS	jumlah penduduk yg BABS (jiwa)	Prosentase penduduk yang melakukan BABS
1	Kota Gorontalo	13,254	53,451	28.3%
2	Kabupaten Gorontalo	45,494	211,455	54.4%
3	Kabupaten Bone Bolango	21,357	81,640	53.4%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	19,060	76,471	70.8%
5	Kabupaten Pohuwato	16,526	69,393	51.3%
6	Kabupaten Boalemo	13,748	54,106	39.7%

Sumber : Identifikasi data dan analisis roadmap.

Minimnya infrastruktur IPLT dan MCK maupun armada truk pengangkut tinja mengakibatkan tingkat BABS yang relative tinggi, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.14 di atas. Berdasarkan pendataan dan penghitungan, disimpulkan bahwa rata-rata 50% penduduk di Provinsi Gorontalo masih diklasifikasikan melakukan praktek BABS. Oleh karena itu pembenahan di komponen air limbah sudah menjadi keharusan untuk dilakukan di Provinsi Gorontalo.

Kondisi BABS berdasarkan hasil study EHRA (enviromtmental health risk assessment) pada Buku Putih Sanitasi tahun 2012–2013 di 6 kabupaten/kota menunjukkan fakta sebagai berikut:

Tabel 2.15
Profil BABS Hasil EHRA di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	BABS	
		Ya (%)	Tidak (%)
1	Kota Gorontalo	30,3	69,7
2	Kabupaten Gorontalo	35	65
3	Kabupaten Bone Bolango	95	5
4	Kabupaten Gorontalo Utara	68	32
5	Kabupaten Pohuwato	58	42
6	Kabupaten Boalemo	64	36

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota

c. Peraturan tentang pengelolaan air limbah

Dari aspek perencanaan air limbah, terlihat seluruh Kab/kota yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki perencanaan sebagai acuan pengelolaan dan pembangunan komponen air limbah ke depan, tinggal Kab. Bone Bolango yang belum memiliki masterplan air limbah, secara jelas (lihat Tabel 2.15). Oleh karena itu perlu dorongan provinsi agar Kab. Bone Bolango agar dapat segera menyusun perencanaan air limbah sebagai acuan pembangunan air limbah yang terstruktur.

Tabel 2.16
Profil Perencanaan Air Limbah di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Masterplan Air Limbah
1	Kota Gorontalo	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	Ada	Ada	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	Ada	Ada	Tidak ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Ada	Ada	Ada
5	Kabupaten Pohuwato	Ada	Ada	Ada
6	Kabupaten Boalemo	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data dari kabupaten/kota

d. Pendanaan pembangunan air limbah

Pendanaan pengelolaan dan pembangunan persampahan secara tidak langsung memperlihatkan kepedulian kabupaten/kota terhadap kesehatan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Tabel 2.16 memperlihatkan bahwa baru Kabupaten Gorontalo yang memiliki pendanaan untuk investasi dan OM air limbah 5 kabupaten/kota lainnya belum memasukkan data terkait pendanaan layanan air limbah di daerah.

Tabel 2.17
Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Air Limbah di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Pendanaan investasi air limbah baru	Besar pendanaan OM air limbah	Total investasi dan OM air limbah	Total APBD	% OM & investasi baru air limbah terhadap APBD
1	Kota Gorontalo	100,000,000.0	200,000,000.0	300,000,000.0	825,000,000,000	0.04%
2	Kabupaten Gorontalo	2,164,260,000.0	541,065,000.0	2,705,325,000.0	850,646,801,914	0.32%
3	Kabupaten Bone Bolango	1,654,044,000.0	0.0	1,654,044,000.0	596,642,827,112	0.28%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	360,000,000.0	97,168,120.0	457,168,120.0	415,000,000,000	0.11%
5	Kabupaten Pohuwato	0.0	0.0	0.0	592,682,964,063	0.00%
6	Kabupaten Boalemo	112,000,000.0	0.0	112,000,000.0	487,378,818,979	0.02%

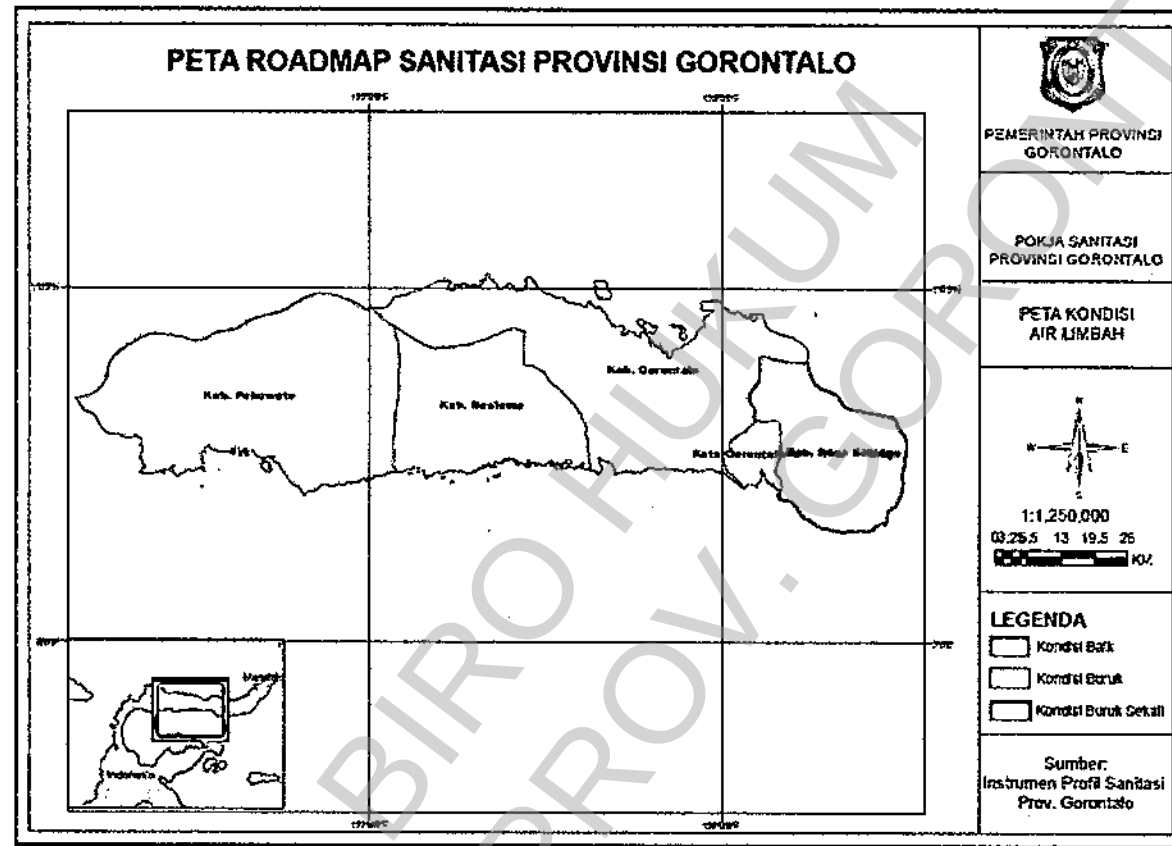
Sumber : Data dari kabupaten/kota

Berdasarkan analisis (lihat Lampiran) terhadap profil air limbah di atas, maka gambaran pengelolaan air limbah eksisting di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada peta Gambar 2.2 di bawah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah di Provinsi Gorontalo dikategorikan sangat buruk. Oleh

karena itu perlu dilakukan prioritas yang lebih tinggi terhadap penanganan komponen air limbah.

Tindakan advokasi hingga pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah agar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki dasar hukum pengelolaan air limbah yang kuat, perencanaan yang mumpuni, merubah perilaku, hingga meningkatkan akses terhadap infrastruktur pengelolaan air limbah yang *improved* sudah sangat tinggi urgensinya.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO



Gambar 2.2 Kondisi pengelolaan Air Limbah Provinsi Gorontalo

2.1.4 Kondisi Pengelolaan Drainase

a. Peraturan tentang pengelolaan drainase

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diidentifikasi semua Kab/Kota telah menyusun peraturan drainase di daerahnya, yakni Perka SKPD, sedangkan untuk Perda dan Perwako/Perbup seluruh daerah belum dibuat. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan advokasi tentang pentingnya pengaturan tentang drainase lingkungan di seluruh wilayah provinsi. Selengkapanya keberadaan peraturan mengenai drainase dapat dilihat pada Tabel 2.17 di bawah.

Tabel 2.17
Keberadaan Peraturan tentang Drainase di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	Perda	PerBup / PerWako	Perka SKPD
1	Kota Gorontalo	-	-	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	-	-	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	-	-	Ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	Ada
5	Kabupaten Pohuwato	-	-	Ada
6	Kabupaten Boalemo	-	-	Ada

Sumber : Data dari kabupaten/kota

b. Infrastruktur pengelolaan drainase terbangun

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang infrastruktur pengelolaan drainase terbangun di Provinsi Gorontalo, dapat dilihat secara jelas pada Tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18
Profil Infrastruktur Drainase Terbangun di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR EKSISTING			DAERAH GENANGAN			
		Panjang drainase terbangun (m)	% drainase terbangun terhadap kebutuhan ideal	NILAI INFRASTRUKTUR EKSISTING	Luas daerah rawan genangan (ha)	Luas genangan (ha)	Luas pengurangan daerah genangan (ha)	% luas daerah genangan yg telah terbebas genangan
1	Kota Gorontalo	15,000	3.2498%	1	75.0	1.4	73.6	98.12%
2	Kabupaten Gorontalo	20,370	0.4715%	1	9,524.6	9,524.6	0.0	0.00%
3	Kabupaten Bone Bolango	65,432	9.5101%	1	6.3	6.3	0.0	0.00%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	12,000	2.0720%	1	2,348.0	2,182.0	166.0	7.07%
5	Kabupaten Pohuwato	12,652	0.7786%	1	7,500.0	7,500.0	0.0	0.00%
6	Kabupaten Boalemo	13,250	0.8583%	1	6,500.0	6,500.0	0.0	0.00%

Sumber : Data dari kabupaten/kota

Tabel 2.18 di atas memperlihatkan bahwa profil infrastruktur drainase di Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut :

- Semua kabupaten/kota di wilayah provinsi yang masih harus membangun drainase agar kebutuhan penampungan dan penyaluran air permukaan dapat dikelola dengan lebih baik;
- Kekurangan drainase di kabupaten/kota di atas membawa dampak pada terbentuknya daerah-daerah rawan genangan. Pembangunan drainase hingga mencukupi persyaratan panjang drainase diharapkan akan dapat mengurangi daerah genangan ini.

c. Perencanaan pengelolaan drainase

Dari aspek perencanaan drainase, terlihat 6 (enam) kabupaten/kota yang telah memasukkan perencanaan drainase ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Tabel 2.19 di bawah secara jelas memperlihatkan bahwa sudah ada rencana induk pembangunan drainase sehingga arah pembangunan drainase dapat teridentifikasi.

Tabel 2.19
Profil Perencanaan Drainase di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

No	Nama Kabupaten/Kota	RENCANA		
		Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Masterplan Drainase
1	Kota Gorontalo	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Gorontalo	Ada	Ada	Ada
3	Kabupaten Bone Bolango	Ada	Ada	Ada
4	Kabupaten Gorontalo Utara	Ada	Ada	Ada
5	Kabupaten Pohuwato	Ada	Ada	Ada
6	Kabupaten Boalemo	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data dari kabupaten/kota

d. Pendanaan pembangunan drainase

Pendanaan pengelolaan dan pembangunan drainase secara tidak langsung memperlihatkan kepedulian kabupaten/kota terhadap kesehatan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Tabel 2.20 memperlihatkan bahwa 2 kabupaten/kota sudah mendanai investasi dan OM di bidang layanan drainase. 4 kabupaten lainnya belum memasukkan data terkait pendanaan drainase di daerahnya.

Tabel 2.20
Profil Pendanaan Pengelolaan dan Pembangunan Drainase di Provinsi Gorontalo Tahun 2013

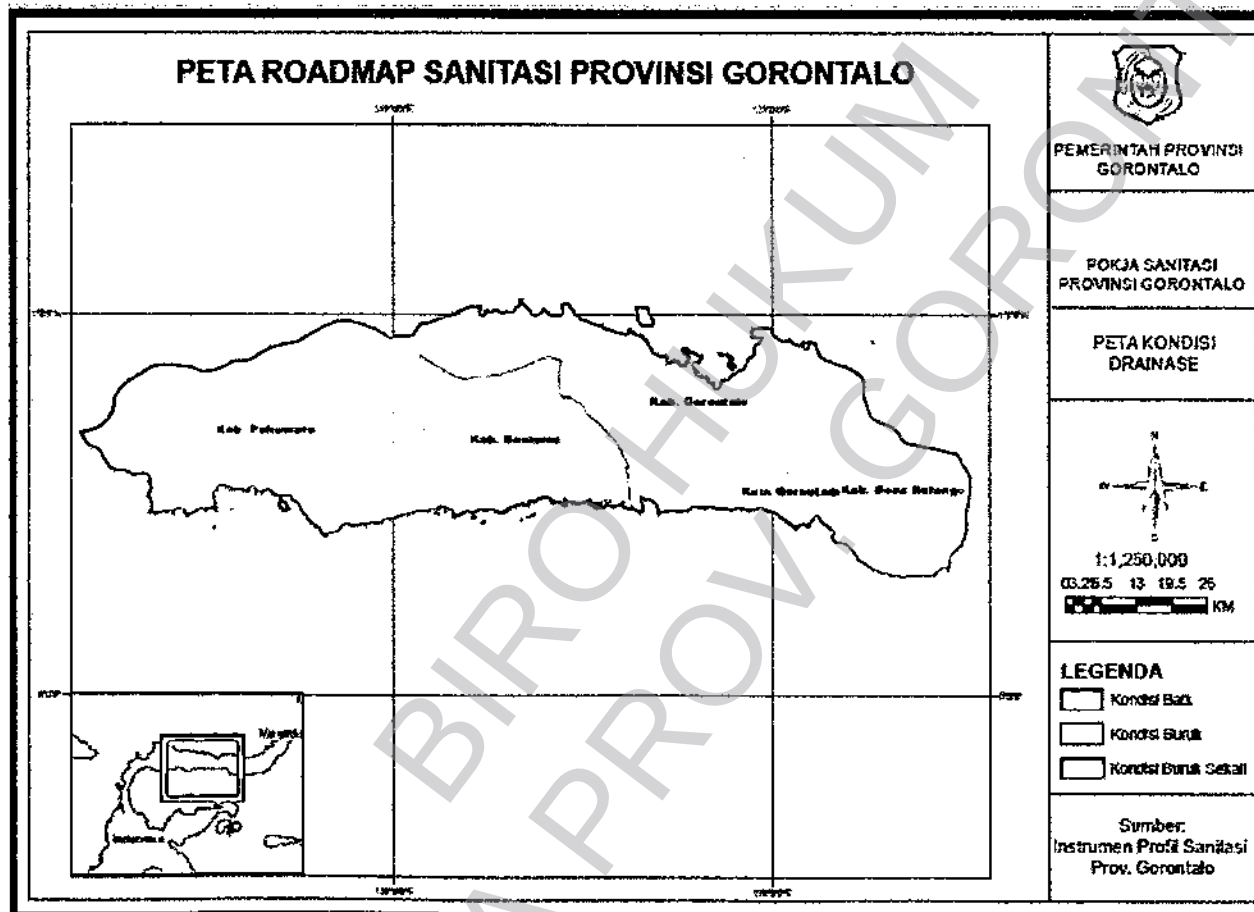
No	Nama Kabupaten/Kota	Pendanaan investasi drainase baru	Besar pendanaan O&M drainase	Total investasi dan OM drainase	Total APBD	% OM & investasi baru drainase terhadap APBD
1	Kota Gorontalo	11,563,000,000	2,890,750,000	14,453,750,000	825,000,000,000	1.75%
2	Kabupaten Gorontalo	7,300,000,000	1,825,000,000	9,125,000,000	850,646,801,914	1.07%
3	Kabupaten Bone Bolango	1,200,000,000	-	1,200,000,000	596,642,827,112	0.20%
4	Kabupaten Gorontalo Utara	425,000,000	155,300,000	580,300,000	415,000,000,000	0.14%
5	Kabupaten Pohuwato	-	-	-	592,682,964,063	0.00%
6	Kabupaten Boalemo	882,500,000.0	-	882,500,000.0	487,378,818,979	0.18%

Sumber : Data dari kabupaten/kota

Berdasarkan analisis (lihat Lampiran) terhadap profil drainase di atas, maka gambaran pengelolaan drainase eksisting di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Provinsi Gorontalo dikategorikan dari kondisi sedang hingga buruk sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan konsolidasi pembangunan drainase agar pembangunan infrastruktur drainase di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO



Gambar 2.3 Kondisi drainase di Provinsi Gorontalo

2.1.5 Area Beresiko Rawan Sanitasi

Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota yang telah disusun tahun 2013 – 2014 oleh 4 kabupaten/kota mengungkapkan fakta akan kondisi eksisting yang lebih akurat tentang pemetaan sanitasi di daerah yang dikategorikan sebagai area beresiko rawan sanitasi. Dari 4 BPS yang telah tersusun dan melalui tahapan konsultasi publik, teridentifikasi sebanyak 258 kelurahan/desa merupakan area beresiko sanitasi dengan kategori "tinggi" dan 37 kelurahan/desa merupakan area beresiko sanitasi dengan kategori "sangat tinggi".

Tabel 2.21
Area Beresiko Rawan Sanitasi di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Resiko		Jumlah Desa Beresiko	Total Desa	Penyebab
		Resiko 4	Resiko 3			
1	Kota Gorontalo	-	14 Desa	14 DESA 28%	50	air limbah, sampah, PHBS
2	Kabupaten Gorontalo	8 Desa	75 Desa	53 Desa 41,46%	205	air limbah, sampah,phbs, genangan/banjir
3	Kabupaten Bone Bolango	18 Desa	71 Desa	89 Desa 53,94%	165	air limbah, sampah, PHBS
4	Kabupaten Gorontalo Utara	11 Desa	98 Desa	109 DESA 89,34%	122	air limbah, sampah, PHBS
5	Kabupaten Pohuwato	11Desa	28 Desa	39 Desa	104	Air Limbah, Sampah dan Drainase, PHBS
6	Kabupaten Boalemo	42 Desa	42 Desa	84 Desa	84	Air Limbah, Sampah dan Drainase, PHBS

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kab/Kota

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO

3.1 Visi Pembangunan Sanitasi

Dengan melihat kondisi eksisting sanitasi di Provinsi Gorontalo, maka visi sanitasi yang diangkat adalah : **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorontalo yang sehat dan sejahtera tahun 2019”**. Dalam hal ini berarti sanitasi harus dapat menjadi bentuk usaha preventif di bidang kesehatan sampai dengan tahun 2019, sehingga dapat mendukung visi Terwujudnya Percepatan Pembangunan berbagai bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo.

3.2 Misi Pembangunan Sanitasi

Guna mendukung pencapaian visi pembangunan sanitasi di atas, maka misi sanitasi yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Misi Persampahan

Upaya-upaya pembangunan komponen persampahan yang dikembangkan sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
2. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan.

3.2.2 Misi Air Limbah

Upaya-upaya pembangunan komponen air limbah yang dikembangkan sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pengelolaan air limbah.
2. Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah.

3. Terciptanya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengolahan air limbah.

3.2.3 Misi Drainase

Upaya-upaya pembangunan komponen drainase yang dikembangkan sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berkualitas.
2. Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan drainase menuju kearah kemandirian daerah.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO

Strategi yang akan dikembangkan dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo tidak akan lepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan sanitasi yang akan diselenggarakan oleh Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan di atas agar penyelenggaraan pembangunan sanitasi dapat dilakukan sesuai dengan arahan yang ditetapkan.

Sebagaimana tujuan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo, maka isu-isu strategi yang dikembangkan dapat menjadi strategi kebijakan pembangunan sanitasi ke depan hingga tahun 2019. Isu strategi dikembangkan dengan mengikuti tujuan dan sasaran setiap komponen sanitasi sebagaimana di atas. Adapun isu strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

4.1 Isu Strategis

a. Komponen Persampahan

- (S) Sudah adanya TPA regional yang melayani 3 kabupaten kota yang pengelolaannya dilakukan oleh UPTD khusus di Provinsi Gorontalo
- (S) Adanya program bank sampah yang dikelola masyarakat, sekolah dan pemerintah.
- (W) penerapan regulasi terkait retribusi sampah belum diterapkan secara maksimal.
- (W) Terbatasnya program pengelolaan persampahan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda.
- (T) Masih kuatnya stigma negatif di masyarakat mengenai pengelolaan sampah.
- (W) Dana APBD untuk penganggaran sanitasi baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota masih sangat terbatas.
- (O) Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (W) Masih minimnya pihak swasta yang tertarik dalam mengelola persampahan.
- (W) Rendahnya akses pelayanan dan cakupan penanganan komponen persampahan di Provinsi Gorontalo akibat banyaknya produksi sampah yang tidak terlayani akibat minimnya infrastruktur

- (T) Minimnya fasilitas pendukung persampahan di perumahan yang dikembangkan swasta (developer)
- (T) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga.

b. Komponen Air Limbah

- (W) belum adanya infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL/IPLT) yang melayani secara regional.
- (T) kepemilikan tangki septik di masyarakat masih rendah.
- (T) Tingginya pencemaran akibat tangki septik tidak aman dan rendahnya pemahaman pengelolaan air limbah domestik
- (W) Banyaknya tangki septik yang tidak pernah dikuras akibat tidak adanya prasarana dan sarana pendukung serta rendahnya pemahaman masyarakat
- (W) masih kurangnya IPLT yang terbangun.
- (W) Masih rendahnya ketersediaan MCK Umum.
- (W) Masih tingginya angka BABS.
- (W) Kondisi sanitasi khususnya komponen air limbah tatanan sekolah dasar masih rendah
- (s) Adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program/kegiatan pembinaan teknis pengelolaan air limbah permukiman.
- (T) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman, terkait tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat pesisir pantai.
- (T) Sarana MCK yang ada tidak dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan dan persediaan sabun, & tidak adanya operasional dan maintenance.
- (W) Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah.
- (O) Dunia usaha/swasta ada beberapa berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah tinja .
- (W) Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja belum diberdayakan oleh Pemda.
- (w) Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja terbentur dengan lokasi pembangunan.

- (W) potensi lahan di beberapa daerah memungkinkan penerapan pengelolaan air limbah tinja.
- (T) Kondisi geografis khususnya kawasan pesisir tidak memungkinkan untuk pembuatan septic tank dengan sumur resapan.
- (W) Belum ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan operasional dan maintenance serta biaya sarana penunjang IPLT.
- (T) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta.
- (O) Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN, dan partisipasi masyarakat.
- (T) Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang limbah tinja.
- (W) Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah.
- (W) Koordinasi lintas sektor masih kurang.
- (W) Ketersediaan peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah dan pelayanan penyedotan limbah tinja kurang.
- (O) Adanya UU No 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 yang menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (S) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Gorontalo.
- (S) adanya monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik.

c. Komponen Drainase

- (W) drainase yang terbangun belum terkoneksi dengan baik.
- (W) Masih minimnya infrastruktur jaringan drainase yang ada terutama terkait dengan fungsi jaringan drainase untuk menyalurkan air dalam rangka mengurangi genangan air dan banjir
- (W) Rendahnya aspek kepedulian masyarakat dan Pemerintah dalam rangka mengelola dan memelihara jaringan drainase yang telah terbangun di lingkungan permukiman.
- (S) Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase yang melibatkan masyarakat.

- (T) Sebagian masyarakat masih menggunakan drainase sebagai pembuangan sampah dan air limbah.
- (S) Sudah ada Master Plan Drainase.
- (S) Kegiatan tentang pemeliharaan rutin drainase sudah masuk dalam Renstra Dinas PU dan RPJMD.
- (S) Adanya Program pemeliharaan / Rehabilitasi dan peningkatan Drainase.
- (W) Sebagian kecil masyarakat belum komprehensif atas program peningkatan drainase.
- (S) Sudah ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan operasional dan maintenance drainase.
- (W) Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor.
- (W) Belum adanya monitoring dan evaluasi mengenai target pencapaian panjang drainase terbangun.
- (O) Adanya dukungan dana Drainase dari program yang berbasis masyarakat (PNPM dan PPIP)

4.2 Penetapan Strategi Pembangunan Sanitasi dengan metode SWOT

Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

ANALISIS SWOT dapat memberikan gambaran hasil analisis keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan secara menyeluruh yang digunakan sebagai dasar atau landasan penyusunan objective dan strategi daerah dalam corporate planning.

Dalam menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT melalui analisis data-data dan hasil proses-proses pada tahapan sebelumnya pada Tabel 4.1 Identifikasi SWOT berikut :

Tabel 4.1 Identifikasi SWOT Komponen Persampahan

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan (S) - (S) Sudah adanya TPA regional yang melayani 3 kabupaten kota yang pengelolaannya dilakukan oleh UPTD khusus di Provinsi Gorontalo - (S) Adanya program bank sampah yang dikelola masyarakat, sekolah dan pemerintah.	(+) Peluang (O) 1. (O) Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(-) Kelemahan (W) - (w) penerapan regulasi terkait retribusi sampah belum diterapkan secara maksimal. - (W) Terbatasnya program pengelolaan persampahan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda. - (W) Dana APBD untuk penganggaran sanitasi baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota masih sangat terbatas. - (W) Masih minimnya pihak swasta yang tertarik dalam mengelola persampahan. - (W) Rendahnya akses pelayanan dan cakupan penanganan komponen persampahan di Provinsi Gorontalo akibat banyaknya produksi sampah yang tidak terlayani akibat minimnya infrastruktur	(-) Ancaman (T) - (T) Masih kuatnya stigma negatif di masyarakat mengenai pengelolaan sampah. - (T) Minimnya fasilitas pendukung persampahan di perumahan yang dikembangkan swasta (developer). - (T) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga.

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Tabel 4.2 Identifikasi SWOT Komponen Air Limbah

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan (S) - (s) Adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program/kegiatan pembinaan teknis pengelolaan air limbah permukiman. - (S) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Gorontalo. - (S) adanya monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik.	(+) Peluang (O) - (O) Adanya UU No 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 yang menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah. - (O) Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN, dan partisipasi masyarakat. - (O) Dunia usaha/swasta ada beberapa berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah tinja. - (T) Kondisi geografis khususnya kawasan pesisir tidak memungkinkan untuk pembuatan septic tank dengan sumur resapan.
(-) Kelemahan (W) - (W) belum adanya infrastruktur pengolahan	(-) Ancaman (T) - (T) Belum optimalnya penggalan potensi

air limbah (IPAL/IPLT) yang melayani secara regional. - (W) Belum ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan operasional dan maintenance serta biaya sarana penunjang IPLT. - (W) Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah. - (W) Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja belum diberdayakan oleh Pemda. - (w) Potensi dunia usaha terkait sistem pengelolaan limbah tinja terbentur dengan lokasi pembangunan. - (w) potensi lahan di beberapa daerah memungkinkan penerapan pengelolaan air limbah tinja. - (W) Banyaknya tangki septik yang tidak pernah dikuras akibat tidak adanya prasarana dan sarana pendukung serta rendahnya pemahaman masyarakat - (W) masih kurangnya IPLT yang terbangun. - (W) Masih rendahnya ketersediaan MCK Umum. - (W) Masih tingginya angka BABS. - (W) Kondisi sanitasi khususnya komponen air limbah tatanan sekolah dasar masih rendah. - (W) Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah. - (W) Koordinasi lintas sektor masih kurang. - (w) Ketersediaan peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah dan pelayanan penyedotan limbah tinja kurang.	pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta. - (T) Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang limbah tinja. - (T) kepemilikan tangki septik di masyarakat masih rendah. - (T) Tingginya pencemaran akibat tangki septik tidak aman dan rendahnya pemahaman pengelolaan air limbah domestik. - (T) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman, terkait tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat pesisir pantai. - (T) Sarana MCK yang ada tidak dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan dan persediaan sabun, & tidak adanya operasional dan maintenance.
---	---

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Tabel 4.3 Identifikasi SWOT Komponen Drainase

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan (S) - (S) Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase yang melibatkan masyarakat. - (S) Sudah ada Master Plan Drainase. - (S) Kegiatan tentang pemeliharaan rutin drainase sudah masuk dalam Renstra Dinas PU dan RPJMD. - (S) Adanya Program pemeliharaan / Rehabilitasi dan peningkatan Drainase. - (S) Sudah ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan operasional dan maintenance drainase.	(+) Peluang (O) - (O) Adanya dukungan dana Drainase dari program yang berbasis masyarakat (PNPM dan PPIP)
(-) Kelemahan (W) - (W) Sebagian kecil masyarakat belum komprehensif atas program peningkatan drainase. - (W) drainase yang terbangun belum terkoneksi dengan baik. - (W) Masih minimnya infrastruktur jaringan drainase yang ada terutama terkait dengan fungsi jaringan drainase untuk menyalurkan air dalam rangka mengurangi genangan air dan banjir - (W) Rendahnya aspek kepedulian masyarakat dan Pemerintah dalam rangka mengelola dan memelihara jaringan drainase yang telah terbangun di lingkungan permukiman. - (W) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor. - (W) Belum adanya monitoring dan evaluasi mengenai target pencapaian panjang drainase terbangun.	(-) Ancaman (T) - (T) Sebagian masyarakat masih menggunakan drainase sebagai pembuangan sampah dan air limbah.

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Pemetaan SWOT diatas sangat penting untuk memahami kondisi sanitasi sebenarnya di Provinsi Gorontalo. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi di tabel 4.2 penentuan alternatif strategi dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.4 Matriks SWOT Komponen Persampahan

Eksternal	Opportunity (Peluang) : - (O) Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Threat (Ancaman) : - (T) Masih kuatnya stigma negatif di masyarakat mengenai pengelolaan sampah. - (T) Minimnya fasilitas pendukung persampahan di perumahan yang dikembangkan swasta (developer). - (T) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga.
Internal	Alternatif Strategi : - Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan persampahan permukiman - Menyelenggarakan perencanaan di bidang persampahan secara menyeluruh dan terintegrasi	Alternatif Strategi : - Mendorong pihak pengembang perumahan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di lingkungan permukiman - Mempercepat penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan persampahan di lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan
Weakness (Kelemahan): - (S) Sudah adanya TPA regional yang melayani 3 kabupaten kota yang pengelolaannya dilakukan oleh UPTD khusus di Provinsi Gorontalo - (S) Adanya program bank sampah yang dikelola masyarakat, sekolah dan pemerintah.	Alternatif Strategi : - Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. - Meningkatkan peran serta masyarakat terkait pemilahan sampah rumah tangga melalui optimalisasi kelompok masyarakat	Alternatif Strategi : - Mengadakan sosialisasi dan kampanye 3R pada masyarakat - Penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan timbulan sampah
Weakness (Kelemahan): - (w) penerapan regulasi terkait retribusi sampah belum diterapkan secara maksimal. - (W) Terbatasnya program pengelolaan persampahan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda. - (W) Dana APBD untuk penganggaran sanitasi baik di provinsi maupun di kabupaten/Kota masih sangat terbatas. - (W) Masih minimnya pihak swasta yang tertarik dalam mengelola persampahan. - (W) Rendahnya akses pelayanan dan cakupan penanganan komponen persampahan di Provinsi Gorontalo akibat banyaknya produksi sampah yang tidak terlayani akibat minimnya infrastruktur.	Alternatif Strategi : - Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. - Meningkatkan peran serta masyarakat terkait pemilahan sampah rumah tangga melalui optimalisasi kelompok masyarakat	Alternatif Strategi : - Mengadakan sosialisasi dan kampanye 3R pada masyarakat - Penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan timbulan sampah

Sumber : Hasil Analisis Pokja

pengelolaan limbah tinja terbentur dengan lokasi pembangunan. - (W) potensi lahan di beberapa daerah memungkinkan penerapan pengelolaan air limbah tinja. - (W) Banyaknya tangki septik yang tidak pernah dikuras akibat tidak adanya prasarana dan sarana pendukung serta rendahnya pemahaman masyarakat - (W) masih kurangnya IPLT yang terbangun. - (W) Masih rendahnya ketersediaan MCK Umum. - (W) Masih tingginya angka BABS. - (W) Kondisi sanitasi khususnya komponen air limbah tatanan sekolah dasar masih rendah. - (W) Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah. - (W) Koordinasi lintas sektor masih kurang. - (W) Ketersediaan peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah dan pelayanan penyedotan limbah tinja kurang.		
---	--	--

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Tabel 4.6 Mahriks SWOT Komponen Drainase

Eksternal Internal	Opportunity (Peluang) : - (O) Adanya dukungan dana Drainase dari program yang berbasis masyarakat (PNPM dan PPIP)	Threat (Ancaman) : - (T) Sebagian masyarakat masih menggunakan drainase sebagai pembuangan sampah dan air limbah.
	Alternatif Strategi : - Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan drainase lingkungan - Menyelenggarakan perencanaan di bidang drainase lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi	Alternatif Strategi : - Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase lingkungan
Kekuatan (Strength): - (S) Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase yang melibatkan masyarakat. - (S) Sudah ada Master Plan Drainase. - (S) Kegiatan tentang pemeliharaan rutin drainase sudah masuk dalam Renstra Dinas PU dan RPJMD. - (S) Adanya Program pemeliharaan / Rehabilitasi dan peningkatan Drainase. - (S) Sudah ada prioritas penganggaran yang mengarah pada kegiatan operasional dan maintenance drainase.		

Weakness (Kelemahan): - (W) Sebagian kecil masyarakat belum komprehensif atas program peningkatan drainase. - (W) drainase yang terbangun belum terkoneksi dengan baik. - (W) Masih minimnya infrastruktur jaringan drainase yang ada terutama terkait dengan fungsi jaringan drainase untuk menyalurkan air dalam rangka mengurangi genangan air dan banjir - (W) Rendahnya aspek kepedulian masyarakat dan Pemerintah dalam rangka mengelola dan memelihara jaringan drainase yang telah terbangun di lingkungan permukiman. - (W) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor. - (W) Belum adanya monitoring dan evaluasi mengenai target pencapaian panjang drainase terbangun.	Alternatif Strategi : - Penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan area genangan di lingkungan pemukiman - Meningkatkan advokasi, promosi, sosialisasi dan kampanye terkait pemeliharaan drainase	Alternatif Strategi : - Mempercepat penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan drainase lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan
--	--	---

Sumber : Hasil Analisis Pokja

BAB V

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI GORONTALO

Kebijakan pembangunan sanitasi diambil dengan langkah merumuskan rancangan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi serta keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi di atas maka kebijakan yang akan diambil pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pembangunan sanitasi 2014-2019 dirumuskan didalam tabel berikut :

Tabel 5.1 Perumusan Kebijakan Pembangunan Persampahan di Provinsi Gorontalo

Visi :

"Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorontalo yang sehat dan sejahtera tahun 2019"

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	1 Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah yang efisien.	1 Meningkatnya jumlah rumah tangga di prov. gorontalo yang terlayani oleh angkutan sampah ke TPA, sesuai target Universal Akses (85% akses layak dan 15% akses dasar	1 Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan persampahan permukiman 2 Menyelenggarakan perencanaan di bidang persampahan secara menyeluruh dan terintegrasi 3 Mempercepat penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan persampahan di lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan 4 Mendorong pihak pengembang perumahan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di lingkungan permukiman	1 Menyusun aturan persampahan baik skala kabupaten, maupun provinsi 2 Menyusun MasterPlan atau dokumen perencanaan lain terkait persampahan, baik skala kab/kota, lintas wilayah, maupun provinsi 3 Menyiapkan penganggaran guna pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana persampahan yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT) 4 Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi
	2 Mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya	2 Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 30% dari total jumlah timbulan sampah.	5 Melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. 6 Meningkatkan peran serta masyarakat terkait pemilahan sampah rumah tangga melalui optimalisasi kelompok masyarakat 7 Mengadakan sosialisasi dan kampanye 3R pada masyarakat 8 Penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan timbulan sampah	5 Membentuk lembaga pengawasan dari berbagai unsur terkait 6 Lebih sering mengadakan program/kegiatan yang melibatkan masyarakat terkait pemilahan sampah rumah tangga melalui optimalisasi kelompok masyarakat lingkungan 7 Penyiapan tim sosialisasi yang rutin melakukan advokasi, promosi, sosialisasi dan kampanye terkait dengan masalah persampahan di masyarakat 8 Menyiapkan penganggaran guna penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan timbulan sampah yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT)
2 Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah berkelanjutan.				
3 Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan.				

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Tabel 5.2 Perumusan Kebijakan Pembangunan Air Limbah di Provinsi Gorontalo

Visi : "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorontalo yang sehat dan sejahtera tahun 2019"				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pengelolaan air limbah	1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem off-site (terpusat)	1 Menurunnya angka BABS di prov Gorontalo sesuai dengan target Universal akses (85% akses layak dan 15% akses sanitasi dasar)	1 Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan air limbah permukiman 2 Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi 3 Meningkatkan layanan pengolahan air limbah dengan sistem on-site, komunal dan off-site	1 Menyusun aturan air limbah baik skala kabupaten, maupun provinsi 2 Menyusun MasterPlan atau dokumen perencanaan lain terkait dengan air limbah, baik skala kab/kota, lintas wilayah, maupun provinsi 3 Menyiapkan penganggaran guna pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana air limbah yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT)
2 Menyiapkan kerangka regulasi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah...			4 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memiliki, menggunakan dan memelihara tangki septik bagi penyehatan lingkungan permukiman 5 Menyiapkan lembaga yang mengelola air limbah dan melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang air limbah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.	4 Penyiapan tim yang rutin melakukan pemantauan dan promosi kesehatan 5 Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator
3 Terciptanya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengolahan air limbah			6 Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman 7 Mendorong pihak pengembang perumahan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman	6 Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman 7 Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi

Sumber : Hasil Analisis Pokja

Tabel 5.3 Perumusan Kebijakan Pembangunan Drainase di Provinsi Gorontalo

Visi : "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk masyarakat Gorontalo yang sehat dan sejahtera tahun 2019"				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berkualitas 2 Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan bagi pembangunan drainase menuju kearah kemandirian daerah	1 Mengurangi jumlah area genangan di Kab/kota provinsi gorontalo	1 Berkurangnya lokasi rawan banjir dan area genangan di lingkungan permukiman	1 Mengembangkan perangkat regulasi perda pengelolaan drainase lingkungan 2 Menyelenggarakan perencanaan di bidang drainase lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi 3 Penyediaan infrastuktur dalam rangka mendukung pengurangan area genangan di lingkungan permukiman	1 Menyusun aturan drainase baik skala kabupaten, maupun provinsi 2 Menyusun MasterPlan drainase baik skala kab/kota, lintas wilayah, maupun provinsi 3 Menyiapkan penganggaran guna penyediaan infrastuktur dalam rangka mengurangi area genangan di lingkungan permukiman yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT)
		2 Meningkatnya cakupan pelayanan drainase di kab/kota provinsi gorontalo	4 Mempercepat penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan drainase lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan	4 Menyiapkan penganggaran guna pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana Drainase Lingkungan yang bersumber dari berbagai pihak (APBN, APBD I, APBD II, SWASTA, MASYARAKAT)
		3 Terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase lingkungan yang bersinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat	5 Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase lingkungan 6 Meningkatkan advokasi, promosi, sosialisasi dan kampanye terkait pemeliharaan drainase	6 Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase lingkungan 7 Penyiapan tim sosialisasi yang rutin melakukan advokasi, promosi, sosialisasi dan kampanye terkait pemeliharaan drainase

Sumber : Hasil Analisis Pokja

BAB VI

PENUTUP

Roadmap Pembangunan Sanitasi Provinsi Gorontalo yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi input di dalam perencanaan dan penganggaran format Provinsi Gorontalo. Input tersebut dimaksudkan agar seluruh perencanaan sanitasi di atas dapat dianggarkan dan diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Roadmap Sanitasi ini juga akan menjadi pegangan untuk seluruh SKPD terkait dalam menjalankan pembangunan sanitasi sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing. Selain itu Roadmap Sanitasi akan disosialisasikan/konsultasi publik kepada seluruh stakeholder provinsi maupun kabupaten/kota agar pembangunan sanitasi dapat dilakukan secara sinergis antara kabupaten/kota dan provinsi.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE